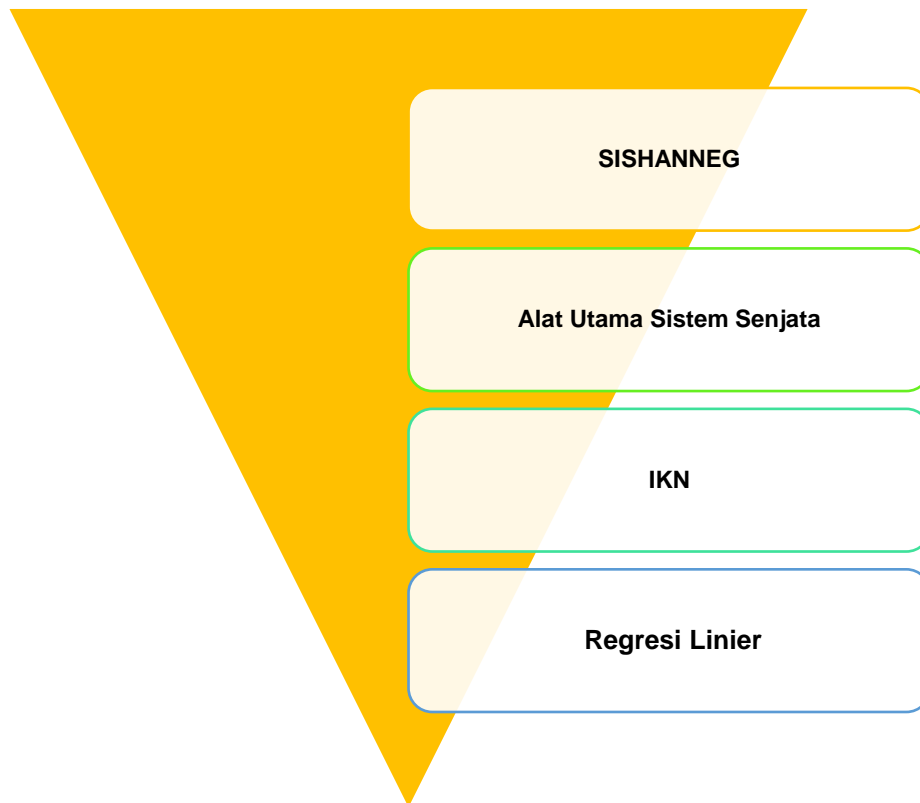


BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori



Gambar 2.1 Skema Landasan Teori dan Keterkaitan Antartopik

Sumber: Diolah Peneliti

Setelah membahas indikasi ancaman, kompleksitas geografis Indonesia dan pentingnya perencanaan pertahanan dan keamanan nasional, selanjutnya dibahas landasan teori terhadap teori-teori yang menjadi landasan penelitian dalam tesis ini. Landasan teori ini yang terbagi menjadi beberapa teori makro, teori mezo dan teori mikro. Teori makro mencakup teori SISHANNEG. Teori mezo mencakup Alat Utama Sistem Senjata (ALUTSISTA) dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sedangkan untuk teori mikro terdiri atas teori Regresi Linier.

2.1.1 Sistem Pertahanan Negara (SISHANNEG)

Negara yang tangguh tentu memiliki sistem pertahanan yang kuat dan efektif untuk melindungi kedaulatan dan keamanannya. Buku Putih Pertahanan Indonesia (Pertahanan, 2015), menjelaskan penyelenggaraan pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, wilayah yang utuh, serta keselamatan seluruh rakyat. Sistem pertahanan negara dirancang sebagai suatu sistem yang bersifat defensif dan non-ekspansionis dalam rangka untuk menjaga kepentingan nasional. Penanganan isu-isu yang terkait dengan pertahanan negara, yang dapat mempengaruhi keamanan nasional, dilakukan dengan pemberian prioritas pada diplomasi sebagai alat utama, yang didukung oleh kekuatan militer yang modern.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, terdapat rinciannya pada Pasal 1 dan 2 yang membahas konsep dasar yang menjadi landasan utama dalam menjaga keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasal 1 mendefinisikan pertahanan negara sebagai rangkaian usaha untuk menjaga kedaulatan, wilayah NKRI, dan keselamatan seluruh bangsa dari ancaman dan gangguan yang dapat mengancam persatuan dan keutuhan negara. Sementara itu, Pasal 2 menggambarkan konsep Sistem Pertahanan negara (Sishanneg) yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, wilayah, dan sumber daya nasional. Sistem ini dirancang untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan menjamin keselamatan seluruh rakyat dari berbagai ancaman.

Dengan demikian, konsep dasar ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan kerja sama yang erat antara pemerintah, wilayah, dan sumber daya nasional dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Pembangunan pertahanan negara sangat ditekankan pada konsep integrasi pertahanan nasional, yang melibatkan baik unsur pertahanan militer maupun non-militer, untuk menghadapi berbagai jenis

ancaman, termasuk yang bersifat militer, non-militer, dan hibrida. Dalam menghadapi ancaman militer, TNI memainkan peran sentral, dengan dukungan yang signifikan dari Komponen Cadangan (Komcad) dan Komponen Pendukung (Komduk) untuk memastikan keselamatan dan keamanan NKRI secara holistik.

Dalam menghadapi ancaman yang bersifat non-militer, penekanan utama diberikan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) di luar sektor pertahanan, dengan dukungan dari unsur-unsur lain dalam kekuatan nasional. Pendekatan ini sejalan dengan landasan kebijakan pertahanan negara, yang dijelaskan dalam Keputusan Menteri Pertahanan No : KEP/1008/M/V/2017. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa pertahanan militer akan dilaksanakan melalui strategi pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force/MEF) dengan tujuan mencapai Kekuatan Esensial (Essential Force/EF) TNI. Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (MEF) ini melibatkan persiapan kekuatan, peningkatan kemampuan, dan penggelaran di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam hal ini, peran Kementerian/Lembaga di luar sektor pertahanan menjadi krusial, karena mereka berperan dalam mengatasi ancaman non-militer yang dapat mempengaruhi stabilitas dan keamanan nasional. Keputusan Menteri Pertahanan tersebut menggarisbawahi pentingnya sinergi antara sektor pertahanan dan elemen-elemen kekuatan nasional lainnya. Dengan demikian, implementasi strategi pembangunan Kekuatan Pokok Minimum bukan hanya merupakan tanggung jawab TNI, tetapi melibatkan keterlibatan aktif Kementerian/Lembaga serta koordinasi efektif dengan seluruh unsur kekuatan nasional. Hal ini mencerminkan pendekatan holistik untuk mencapai Kekuatan Esensial yang tidak hanya melibatkan aspek militer, tetapi juga aspek-aspek lain yang mendukung ketahanan nasional secara menyeluruh..

Di samping itu, peran pertahanan nirmiliter semakin diperkuat melalui keterlibatan yang lebih aktif dari Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menghadapi ancaman yang bersifat non-militer. Selain itu, keterlibatan mereka juga mencakup pengelolaan sumber daya dan infrastruktur nasional yang menjadi aspek krusial dalam menjaga ketahanan nasional. Strategi ini menekankan pada peningkatan kapabilitas pertahanan untuk memastikan keamanan dan kepentingan nasional.

Dalam menghadapi tantangan ancaman hibrida, Indonesia telah merumuskan pendekatan pertahanan militer sebagai dasar yang kokoh, namun dengan penekanan khusus pada penguatan pertahanan non-militer. Pendekatan ini dirancang untuk diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam Komponen Pendukung, sejalan dengan dinamika perubahan situasi dan intensitas ancaman yang dapat muncul. Dengan demikian, penguatan pertahanan nirmiliter tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga menjadi elemen integral dalam kerangka pertahanan nasional Indonesia, menunjukkan komitmen untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan nasional melalui pendekatan yang holistik.

2.1.1.1 Strategi Pertahanan Indonesia

Menurut Chandler (1969), strategi tidak hanya berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, dan alokasi prioritas sumber daya, tetapi juga sebagai suatu doktrin umum yang dirumuskan oleh pemimpin tertinggi, seperti yang dijelaskan oleh Prabaswari (2021). Tujuan strategi dalam konteks pertahanan adalah merinci doktrin umum menjadi rencana dan tata pelaksanaan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Clausewitz (1984) menyatakan bahwa strategi adalah jembatan yang menghubungkan kekuatan militer dengan tujuan politik. Strategi tidak hanya terkait dengan kekuatan militer dan tujuan politik, melainkan juga melibatkan penggunaan kekuatan dan ancaman kekuatan untuk mencapai tujuan kebijakan.

Strategi Pertahanan Negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor Per/22/M/XI1/2007 tanggal 28 Desember 2007, disusun oleh pemerintah untuk mengembangkan dan memelihara kemampuan pertahanan menghadapi berbagai ancaman. Pendekatan strategi ini tidak hanya bersifat militer, melainkan mencakup tiga pilar utama: penggunaan kekuatan pertahanan, kerjasama internasional, dan pembangunan kemampuan pertahanan.

Strategi Pertahanan Negara Republik Indonesia mengusung pendekatan defensif aktif, sebagaimana dijelaskan oleh Yanuarti dkk (2020). Pendekatan ini menekankan respons aktif terhadap ancaman yang ditujukan pada kedaulatan, integritas wilayah, dan keselamatan bangsa, tanpa tujuan agresi atau penyerangan. Konsep dasar strategi ini menjadi sarana untuk menjaga kedaulatan, melindungi integritas wilayah, dan memastikan keselamatan warga negara dari berbagai ancaman. Dalam "Strategi Pertahanan Negara," diuraikan bahwa langkah-langkah dan kebijakan yang mendukung upaya mempertahankan kedaulatan dan melindungi bangsa akan dijabarkan lebih lanjut :

- a. Strategi berlapis, yaitu strategi yang berpusat pada usaha menjaga keamanan negara dengan mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan negara yang komprehensif (Zudhi, 2018).
- b. Strategi penangkalan, yaitu pada masa damai pertahanan negara diselenggarakan untuk mewujudkan daya tangkal bangsa dan negara dimana kekuatan bersenjata disajikan melalui sumber daya manusia (SDM) dan Alutsista (Alat Utama Sistem Persenjataan). Kedua aspek ini dibangun dan dikembangkan dengan pendekatan yang profesional, bertujuan untuk mencapai tingkat kekuatan yang memenuhi standar penangkalan. Standar penangkalan ini merujuk pada tingkat

kekuatan yang diakui dan dihormati secara minimal dalam lingkup regional (Pertahanan, 2015).

2.1.1.2 Perkembangan Lingkungan Strategis

Lingkungan strategis adalah konsep penting dalam bidang kebijakan luar negeri dan pertahanan yang merujuk pada beragam faktor eksternal yang dapat berpengaruh signifikan terhadap strategi dan kebijakan suatu negara (Putra & Hakim, 2016). Konsep ini mencakup sejumlah dimensi yang melibatkan faktor geopolitik, keamanan, ekonomi, sosial, dan politik yang secara kolektif memengaruhi pilihan dan keputusan negara tersebut dalam konteks global.

Dalam memahami perkembangan lingkungan strategis, terdapat dua elemen utama yang memainkan peran kunci. Pertama, posisi geografis negara menjadi faktor penting karena memengaruhi hubungan dengan negara-negara tetangga dan potensi ancaman yang dapat datang dari wilayah tertentu. Kedua, isu-isu strategis global, regional, dan nasional menjadi fokus utama dalam analisis lingkungan strategis. Ini mencakup evaluasi keamanan strategis yang berkaitan dengan ancaman yang mungkin timbul dari konflik atau ketegangan internasional, perkembangan isu-isu penting seperti perdagangan, energi, dan lingkungan, serta faktor-faktor yang dapat memicu tantangan dan ancaman dalam lima tahun mendatang. Pemahaman yang mendalam tentang lingkungan strategis ini menjadi landasan yang penting dalam merancang model pemenuhan kebutuhan Alutsista menggunakan pemrograman linier. Dalam konteks ini, pemodelan mempertimbangkan berbagai faktor yang mencakup aspek-aspek keamanan dan tantangan yang mungkin timbul dalam melindungi dan mempertahankan kepentingan nasional. Dengan demikian, pemahaman komprehensif terhadap lingkungan strategis memungkinkan perencanaan pertahanan nasional yang lebih akurat dan efisien dalam menghadapi berbagai perubahan dan dinamika di tingkat global dan regional.

2.1.2 Alat Utama Sistem Senjata (ALUTSISTA)

Dalam mengkaji kapabilitas militer suatu negara, pendekatan yang umumnya digunakan adalah melalui evaluasi dan analisis terhadap Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) yang dimilikinya. Alutsista merujuk pada berbagai jenis perangkat inti yang terlibat dalam sistem senjata dan digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan nasional. Konsep Alutsista mencakup beragam perangkat inti dan pendukungnya, membentuk suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pokok TNI (Najieb dkk, 2021). Proses pengadaan Alutsista TNI melibatkan sejumlah tahap, yang dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga tahap penerimaan Alutsista TNI. Pentingnya Alutsista berfungsi sesuai dengan tujuan penggunaannya diatur dengan ketat dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014, untuk memastikan kesiapan dan efektivitasnya dalam mendukung tugas pertahanan negara.

Definisi Alat Utama melibatkan beragam peralatan strategis, termasuk kendaraan taktis, senjata, amunisi, pesawat terbang, alat berat khusus, peralatan untuk menangani bahan peledak, perlengkapan tempur perorangan, radar, kapal, dan berbagai jenis Alat Utama lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 6 Tahun 2017. Alat Utama Sistem Senjata merupakan elemen penting dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara. Perspektif ini sejalan dengan pandangan Jasjit Singh, yang menekankan tiga unsur utama sebagai faktor penentu dalam menganalisis kapabilitas pertahanan suatu negara, yaitu sumber daya manusia (manpower), peralatan militer (machine), dan anggaran pertahanan (money) (Milia, Kurniawan & Poespito Hadi, 2017). Analisis komprehensif terhadap Alutsista tidak hanya mencakup aspek teknis dan teknologinya, tetapi juga melibatkan pertimbangan strategis, kebijakan pertahanan, serta kerja sama antarlembaga dan stakeholders guna meningkatkan efektivitas sistem pertahanan nasional secara keseluruhan.

2.1.2.1 Alat Utama Sistem Senjata (ALUTSISTA) Matra Darat

Alat Utama Sistem Senjata (ALUTSISTA) Matra Darat adalah komponen penting dalam sistem pertahanan suatu negara yang berfokus pada pertahanan di daratan atau wilayah tertentu. ALUTSISTA Matra Darat terdiri dari berbagai jenis senjata, peralatan, kendaraan tempur, dan perlengkapan militer yang dirancang dan digunakan untuk melindungi wilayah suatu negara serta menghadapi berbagai ancaman yang mungkin muncul di darat. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait dengan ALUTSISTA Matra Darat:

- a. Kendaraan tempur, mencakup berbagai jenis kendaraan tempur seperti tank, kendaraan lapis baja, kendaraan taktis lapis baja, kendaraan artileri mencakup artileri pertahanan darat dan pertahanan udara, kendaraan pendukung dan logistik serta pesawat terbang dan helikopter.
- b. Senjata api, mencakup senjata api seperti senapan, meriam, mortir, artileri, peluncur rudal, pelontar roket dan berbagai jenis senjata ringan.

Dilansir dari Okezone.com (2022) sampai dengan bulan oktober 2022 jumlah alutsista TNI AD terdiri atas 1.430 kendaraan tempur lapis baja, 366 artileri tarik, 331 tank, 153 artileri swagerak, dan 63 peluncur roket.

2.1.2.2 Minimum Essential Force (MEF)

Minimum Essential Force (MEF), atau Kekuatan Minimum yang Esensial, adalah konsep dalam pertahanan militer yang merujuk pada tingkat kekuatan bersenjata yang dianggap sebagai dasar minimum yang diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan suatu negara (Nugroho, 2021). Dari beragam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Unit Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, telah diidentifikasi serangkaian target yang diharapkan dapat dicapai dalam

rentang waktu lima tahun yang akan datang. Proses identifikasi ini melibatkan pemilihan dan penentuan sasaran yang sangat relevan dan strategis dalam konteks mengoptimalkan fungsi dan peran Unit Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara sesuai dengan perubahan dan dinamika lingkungan pertahanan yang terus berkembang. Dengan menetapkan target ini, diharapkan Unit Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dapat melibatkan diri secara efektif dalam mencapai tujuan strategis nasional dalam bidang pertahanan, memberikan kontribusi positif terhadap keamanan negara, serta menjaga stabilitas dan kedaulatan nasional. Berikut adalah gambaran mengenai tujuan dan target yang telah ditetapkan untuk Kedeputan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara :

Tabel 2.1 Target Pemenuhan MEF dan Kontribusi Inhan

| No. | Indikator Tujuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Pemenuhan MEF | 72% | 79% | 86% | 93% | 100% |
| 2 | Kontribusi Inhan | ≥ 50% | ≥ 50% | ≥ 50% | ≥ 50% | ≥ 50% |

Sumber : Renstra Depbidkooorhanneq 2020-2024, 2019

2.1.2.3 Pemenuhan Kebutuhan Alutsista

Pemenuhan kebutuhan Alutsista menandai sebuah dimensi krusial dalam menjamin kesiapan dan kapabilitas pertahanan suatu negara. Kesiapan sebuah satuan operasi dalam menghadapi pertempuran sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain personel yang berkualitas, peralatan yang handal, proses pemeliharaan yang teratur, pelatihan yang efektif, dan aspek keselamatan yang terjaga. Semua faktor ini saling terkait erat dan memiliki dampak timbal balik yang signifikan. Ketidakseimbangan dalam salah satu aspek tersebut dapat memberikan dampak negatif pada aspek lainnya, sehingga harmonisasi dan integrasi antara mereka sangat penting.

Keterampilan personel yang tinggi sangat menentukan efektivitas penggunaan Alutsista. Tanpa tingkat keterampilan yang memadai, penggunaan peralatan tersebut tidak dapat dioptimalkan, sehingga dapat meningkatkan risiko terjadinya insiden atau kecelakaan yang berpotensi merugikan. Saat ini, disayangkan bahwa penelitian mengenai permodelan pemenuhan kebutuhan Alutsista, terutama dalam konteks Ibu Kota Negara (IKN), masih sangat terbatas dan hampir tidak ada. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengembangkan penelitian dan pemahaman dalam hal ini, guna mendukung perencanaan, pengembangan, dan optimalisasi sistem pertahanan nasional. Pada satu penelitian, (Oliver, 2001) menggunakan pendekatan regresi untuk memprediksi kemampuan misi dari pesawat tempur F-16 yang digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat.

2.1.3 Ibu Kota Nusantara (IKN)

Ibu kota negara merupakan sebuah kota yang direncanakan untuk berfungsi sebagai pusat administrasi suatu negara (Thanzani, 2022). Dari segi fisik, Ibu Kota suatu negara memiliki peran yang sangat signifikan dalam konteks administrasi pemerintahan dan menjadi pusat utama untuk pertemuan para pemimpin negara. Istilah "Ibu Kota" sendiri berasal dari bahasa Latin, tepatnya "caput," yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai kepala atau pusat, dan kemudian terkait dengan konsep "capitol" yang merujuk pada lokasi sentral di mana fungsi pemerintahan berpusat. Peran strategis Ibu Kota menjadi semakin penting karena seringkali menjadi fokus utama dalam situasi konflik atau perang.

Ibu Kota bukan hanya sekadar titik pusat administratif, tetapi juga mencerminkan kekuatan dan identitas suatu negara. Sebagai tempat di mana keputusan-keputusan strategis diambil, Ibu Kota menjadi simbol kekuasaan dan kestabilan pemerintahan. Kehadiran para pemimpin negara di Ibu Kota menciptakan dinamika kebijakan yang sangat mempengaruhi arah dan tujuan negara tersebut.

Selain itu, keunikan etimologi kata "Ibu Kota" menggambarkan konsep kepemimpinan yang bersifat sentralistik dan mendemonstrasikan bahwa dari Ibu Kota lah kebijakan nasional bersumber. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran dan makna Ibu Kota dalam konteks sejarah, keamanan, dan diplomasi suatu negara. Menguasai Ibu Kota dianggap sebagai jaminan untuk menguasai sebagian besar musuh atau lawan, yang pada gilirannya dapat merendahkan semangat dan kemampuan mereka untuk mengalahkan musuh (Yahya, 2018).

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjelaskan lebih rinci tentang ibu kota negara, pada pasal satu dijelaskan bahwa:

"Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Sedangkan pada pasal 1 ayat dua dijelaskan bahwa :

"Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini"

Ibu Kota Nusantara berada di lokasi yang memiliki signifikansi strategis sebagai ibu kota Indonesia. Terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Kota Nusantara dipilih sebagai alternatif ibu kota negara yang baru, menggantikan Jakarta (Labolo & Toana, 2022). Lokasi ini dipilih sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi masalah urbanisasi berlebihan dan tekanan lingkungan di Jakarta, serta untuk mendistribusikan pembangunan lebih merata di seluruh Indonesia.

Kondisi geografis Ibu Kota Nusantara adalah salah satu pertimbangan utama dalam pemilihan lokasi ini. Terletak di Kalimantan Timur, wilayah ini memiliki kekayaan alam yang meliputi hutan hujan tropis,

sungai-sungai besar seperti Sungai Mahakam, serta kawasan tambang dan perkebunan. Lokasinya yang berada di pulau Kalimantan memberikan akses yang baik ke sebagian besar wilayah Indonesia, yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Selain itu, Ibu Kota Nusantara juga memiliki potensi untuk menjadi pusat ekonomi dan perdagangan yang signifikan di Indonesia. Posisinya yang berdekatan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei juga menjadikannya sebagai lokasi yang strategis dalam kerja sama regional.

Pemilihan Ibu Kota Nusantara sebagai ibu kota baru Indonesia mencerminkan visi untuk merencanakan dan mengembangkan kota yang modern, berkelanjutan, dan dapat mengakomodasi pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa pembangunan dan pemerataan ekonomi dapat berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

2.1.3.1 Pemindahan Ibu Kota Negara

Pemindahan pusat pemerintahan di Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup fleksibel, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan amandemennya. UUD NKRI Bagian II Pasal 2 menetapkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat perlu mengadakan sidang setidaknya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara, namun tidak memberikan panduan terperinci mengenai lokasi atau tata cara penyelenggaraan ibu kota negara. Oleh karena itu, terdapat tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam merumuskan aturan terkait, termasuk kemungkinan adanya pemindahan ibu kota negara. Dalam konteks ini, tentu diperlukan alasan-alasan yang kuat dan mendasar yang berkaitan dengan efektivitas fungsi pemerintahan. Ketidakspesifikasian mengenai lokasi atau tata cara ibu kota negara dalam peraturan tersebut memberikan ruang bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mempertimbangkan berbagai faktor, seperti aspek strategis, geografis, infrastruktur, dan kebutuhan efektivitas

pemerintahan dalam memutuskan apakah pemindahan ibu kota negara menjadi pilihan yang tepat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pemindahan ibu kota negara menjadi sebuah keputusan yang kompleks, yang perlu dianalisis secara komprehensif dan dengan melibatkan pertimbangan mendalam terhadap dampaknya terhadap fungsi pemerintahan dan perkembangan nasional..

Proses pemindahan pusat pemerintahan merupakan suatu tindakan yang tidak jarang terjadi dan dianggap sebagai langkah yang lumrah, terutama ketika mengamati situasi ibu kota yang sudah mencapai tingkat kepadatan yang tinggi. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga terlihat di berbagai negara di seluruh dunia. Keputusan untuk memindahkan pusat pemerintahan dilakukan dengan berbagai pertimbangan, alasan, dan tujuan yang bervariasi. Di Indonesia, kepadatan penduduk dan aktivitas di ibu kota saat ini dapat menjadi pemicu utama pemikiran untuk merelokasi pusat pemerintahan. Keadaan tersebut dapat mencakup pertimbangan terhadap infrastruktur yang sudah tak dapat menampung perkembangan pesat, peningkatan kualitas hidup warga, serta aspek-aspek strategis terkait keamanan dan pertahanan negara. Selain itu, melihat praktik serupa di berbagai negara lain, alasan pemindahan pusat pemerintahan dapat melibatkan upaya mendistribusikan perkembangan dan kemajuan ke berbagai wilayah untuk mengurangi disparitas pembangunan antar daerah. Dengan demikian, pemindahan pusat pemerintahan menjadi suatu fenomena yang mencerminkan dinamika dan evolusi kebutuhan masyarakat serta tuntutan perkembangan suatu negara. Adanya pemikiran tersebut menggambarkan kompleksitas dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.. Beberapa negara yang telah melakukan pemindahan pusat pemerintahan dapat ditemukan dalam tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2 Negara yang Pernah Memindahkan Ibu Kota Negara

| Negara & Ibu Kotanya | Malaysia (Putrajaya) | Sejong City (Korsel) | Brasilia (Brazil) | Washington DC (USA) |
|---------------------------------|---|--|---|---|
| Waktu Pembangunan | 1996 - 2001 | 2005 - 2030 | 1956 – 1961 | 1790 – 1922 |
| Jarak dari IKN Lama | 25 km | 121 km | 1162 km | 427 km |
| Biaya APBN | \$8 Milyar | \$22 Milyar | \$8,1 Billion | - |
| Fungsi | Ibu Kota Pemerintahan, Rekreasional, Distrik Bisnis Pusat | Ibu Kota Pemerintahan, Science Park, Industri Kreatif, Universitas | Ibu Kota Pemerintahan, Residensial, Sport Center, Rekreasional, Finansial | Ibu Kota Pemerintahan, Residensial, Rekreasional, Komersial, Museum |
| Luas Area | 4.900 Hektar | 7.300 Hektar | 581.400 Hektar | 17.900 Hektar |

Sumber : Hutasoit, 2019

2.1.3.2 Pertahanan Ibu Kota Negara

Pertahanan ibu kota negara adalah salah satu aspek kunci dalam strategi pertahanan suatu negara (Editha dkk, 2023). Hal ini berkaitan dengan bagaimana sebuah negara merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah untuk melindungi wilayah dan ibu kotanya dari potensi ancaman dan serangan yang mungkin datang dari dalam atau luar negara. Kondisi geografis Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, yang mencakup wilayah kepulauan, hutan hujan tropis, sungai besar, dan lahan basah, memengaruhi kebutuhan alutsista matra darat di wilayah tersebut. Alutsista yang dibutuhkan harus sesuai dengan kondisi geografis yang beragam, termasuk kendaraan tempur yang dapat beroperasi di berbagai medan, alat pemantauan perbatasan yang canggih, serta peralatan logistik dan transportasi yang efisien.

Salah satu contoh yang relevan adalah situasi pertahanan ibu kota negara Ukraina, yaitu Kyiv, terhadap potensi ancaman dari Rusia. pertahanan ibu kota Kyiv memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan kedaulatan negara tersebut. Strategi pertahanan Kyiv tidak hanya berfokus pada aspek militer, tetapi juga melibatkan elemen-elemen

diplomasi, politik, dan ekonomi (Caliskan, 2019). Dilansir dari apnews.com (2022), setidaknya ada beberapa faktor yang menjadikan Kyiv sulit dihancurkan oleh Rusia:

- a. Karakteristik Geografis, Kyiv terletak di bagian tengah Ukraina, jauh dari perbatasan dengan Rusia. Jarak yang signifikan ini memberikan buffer alamiah dan kesulitan logistik bagi potensi serangan dari Rusia.
- b. Kompleksitas Urban, Kyiv adalah ibu kota besar dengan populasi yang padat dan infrastruktur yang kompleks. Ini dapat membuat serangan militer di dalam kota menjadi sulit dan berisiko tinggi.
- c. Pertahanan Bersenjata, Ukraina telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat pertahanan militer Kyiv dengan mendirikan pos-pos pertahanan, memodernisasi alutsista, dan melibatkan pasukan yang terlatih.
- d. Dukungan Internasional, Ukraina telah menerima dukungan politik dan militer dari negara-negara Barat dalam upaya mereka untuk menjaga integritas wilayah mereka, termasuk Kyiv. Ini dapat memberikan dorongan penting dalam menghadapi ancaman.
- e. Kesiapan Masyarakat, kesadaran akan potensi ancaman dan persatuan masyarakat di Kyiv dan Ukraina secara keseluruhan dapat menjadi faktor penting dalam pertahanan ibu kota.
- f. Perundingan Diplomatik, selain upaya militer, negosiasi diplomatik juga dapat memainkan peran dalam menghindari konflik yang melibatkan Kyiv dan Rusia.

Penting untuk diingat bahwa situasi pertahanan ibu kota Kyiv adalah bagian dari konflik yang lebih luas antara Ukraina dan Rusia. Strategi pertahanan Kyiv mencerminkan upaya untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara Ukraina, serta perlunya koordinasi yang baik dengan

pihak-pihak internasional yang mendukung Ukraina dalam menghadapi ancaman dari Rusia.

2.1.4 Regresi Linier

Istilah regresi pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton dalam konteks penelitiannya di bidang statistik (Ginting & Situmorang, 2008). Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa anak-anak yang lahir dari orang tua yang memiliki tinggi badan di atas rata-rata cenderung "kembali" mendekati tinggi badan rata-rata dalam populasi. Dalam kerangka ini, Galton memperkenalkan istilah "regresi" untuk merujuk pada proses umum di mana satu variabel (contohnya, tinggi badan orang tua) digunakan untuk memprediksi variabel lain (seperti tinggi badan anak).

Regresi linier melibatkan persamaan yang dikenal sebagai persamaan regresi. Secara umum, persamaan regresi digunakan untuk menggambarkan hubungan linear antara variabel yang kita ingin prediksi, yang disimbolkan dengan Y, dan satu atau lebih variabel prediktor (variabel bebas), yang disimbolkan dengan X. Jika terdapat beberapa variabel prediktor, kita dapat menggunakan simbol X1, X2, dan seterusnya (Cramer & Howitt, 2004). Model persamaan regresi linier ditunjukkan sebagai berikut:

$$Y = a + bX \dots\dots\dots(2.1)$$

Keterangan :

Y = Variabel Response (Dependent)

X = Variabel Predictor (Independent)

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

Nilai-nilai a dan b dapat dihitung dengan rumus dibawah ini :

$$a = \frac{(\sum y) (\sum x^2) - (\sum x) (\sum xy)}{n (\sum x^2) - (\sum x)^2} \dots\dots\dots(2.2)$$

$$b = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2} \dots\dots\dots(2.3)$$

Analisis regresi linier sederhana dapat dilakukan jika telah memenuhi persyaratan-persyaratan berikut (Mudrikah, 2015):

- a. Sampel diambil secara acak.
- b. Terdapat hubungan sebab-akibat antara variabel X dan variabel Y, di mana X menjadi penyebab dan Y menjadi hasilnya.
- c. Distribusi nilai Y mengikuti pola distribusi yang normal.
- d. Persamaan regresi harus benar-benar berbentuk linier.

2.1.4.1 Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda adalah suatu pendekatan statistik yang digunakan untuk mendalami serta menganalisis korelasi antara dua atau lebih variabel independen (prediktor) dengan satu variabel dependen (respon) dalam suatu model matematika. Konsep regresi linier berganda mengeksplorasi hubungan kompleks antara variabel-variabel tersebut dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan dengan regresi linier sederhana. Penting untuk dicatat bahwa perbedaan utama antara regresi linier berganda dan regresi linier sederhana terletak pada jumlah variabel independen yang terlibat dalam upaya memprediksi variabel dependen. Regresi linier berganda memperkenalkan dinamika lebih kompleks dengan melibatkan beberapa faktor prediktor. Hal ini memungkinkan analisis yang lebih holistik terhadap variabilitas dalam variabel dependen, memperkaya pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi hasil yang diamati.

Dalam proses regresi linier berganda, parameter regresi ditemukan untuk setiap variabel independen, memungkinkan identifikasi kontribusi relatif masing-masing faktor terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, regresi linier berganda memberikan kerangka kerja yang lebih

komprehensif untuk memahami dan menggambarkan hubungan antarvariabel dalam suatu konteks analisis statistik. Regresi linear berganda dilakukan dengan cara menetapkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_nX_n + e \dots\dots\dots(2.4)$$

Keterangan :

- Y = Variabel terikat
- X1 = Variabel bebas satu
- X2 = Variabel bebas dua
- a = Konstanta

2.1.4.2 Uji F

Menurut Ghozali (2016), Uji F, yang juga dikenal sebagai uji analisis ragam (ANOVA) dalam konteks regresi linier berganda, bertujuan untuk mengevaluasi signifikansi dari keseluruhan model regresi. Uji ini memberikan gambaran tentang sejauh mana variabilitas dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel independen yang ada dalam model regresi. Dalam analisis regresi linier berganda, uji F digunakan untuk menguji hipotesis bahwa setidaknya satu variabel independen memiliki kontribusi yang signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Dengan kata lain, uji ini melibatkan pertanyaan apakah adanya kombinasi variabel independen dalam model memberikan pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau tidak.

Melalui uji F, peneliti dapat menilai apakah model regresi secara keseluruhan memiliki kecenderungan untuk menjelaskan variasi dalam data atau tidak. Hasil dari uji F yang signifikan menunjukkan bahwa setidaknya satu variabel independen secara bersama-sama memberikan kontribusi yang signifikan terhadap variabel dependen, memberikan dasar untuk mengonfirmasi keberhasilan model regresi dalam menjelaskan pola

hubungan antara variabel-variabel tersebut.. Rumus uji F dapat dihitung dengan menggunakan persamaan:

$$F = \frac{R^2 / (n - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)} \dots\dots\dots(2.5)$$

Keterangan :

- R² = Koefisien determinasi
- n = Jumlah data
- k = Jumlah variabel independen

2.1.4.3 Uji T

Menurut Sugiyono (2018), Uji t adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk mengevaluasi signifikansi dari koefisien regresi individu dalam suatu model regresi. Dalam konteks regresi linier, uji t sering digunakan untuk menguji apakah koefisien regresi dari masing-masing variabel independen secara individu signifikan secara statistik. Tujuan utama uji t adalah untuk menilai apakah variabel independen tertentu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dalam model regresi. Jika nilai t statistik untuk suatu koefisien regresi signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen tersebut memiliki dampak yang nyata terhadap variabel dependen.

Uji t melibatkan perbandingan antara nilai estimasi koefisien regresi dengan standar error dari estimasinya. Jika hasil perhitungan t-statistik melebihi ambang batas tertentu yang ditentukan (biasanya berdasarkan tingkat signifikansi yang telah ditetapkan, seperti 0.05), maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi tersebut signifikan secara statistik. Uji t dapat digunakan untuk mengevaluasi setiap koefisien regresi dalam model regresi linier, sehingga memungkinkan penelitian terhadap pengaruh relatif masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria

dari uji statistik t, seperti yang dijelaskan oleh Ghozali (2016), adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi uji t $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikansi uji t $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen..

2.1.4.4 Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi, sering kali dikenal dengan singkatan R², merupakan suatu parameter statistik yang digunakan dalam konteks analisis regresi untuk mengukur seberapa baik model regresi dapat menjelaskan variasi dari variabel dependen. Nilai R² memberikan gambaran tentang sejauh mana variasi dari variabel dependen dapat diatribusikan atau dijelaskan oleh variabel independen yang terdapat dalam model regresi. Rentang nilai R² berkisar antara 0 hingga 1, dimana nilai mendekati 1 menunjukkan bahwa model regresi mampu menjelaskan sebagian besar variasi dari variabel dependen dengan baik. Di sisi lain, nilai yang mendekati 0 menandakan bahwa model tersebut memiliki keterbatasan dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen.

Dengan kata lain, R² dapat diartikan sebagai proporsi variabilitas dari variabel dependen yang dapat diakuntansi oleh variabel independen dalam suatu model regresi tertentu. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai R², semakin baik model regresi tersebut dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen yang diamati. Sebaliknya, nilai R² yang lebih rendah menunjukkan bahwa model tersebut mungkin tidak mampu menjelaskan sejumlah besar variasi yang terdapat pada variabel dependen. Sebagai salah satu indikator kualitas model, R² menjadi parameter yang penting dalam penilaian kecocokan dan kehandalan suatu regresi..

Dalam interpretasi R², sebaiknya diperhatikan bahwa nilai tersebut tidak dapat menentukan apakah hubungan kausalitas terjadi antara variabel-variabel tersebut, hanya sejauh mana model regresi dapat menjelaskan variasi dari variabel dependen. Oleh karena itu, R² perlu diinterpretasikan bersama dengan konteks analisis dan pertimbangan lainnya.. Interpretasi lebih lanjut mengenai nilai R² yang dihasilkan dapat ditemukan dalam tabel referensi (Tarigan, 2019):

Tabel 2.3 Interpretasi Koefisien Determinasi (R²)

| Interval Koefisien | Interpretasi |
|---------------------------|---------------------|
| 0,80 – 1,000 | Sangat Kuat |
| 0,60 – 0,799 | Kuat |
| 0,40 – 0,599 | Cukup Kuat |
| 0,20 – 0,399 | Rendah |
| 0,00 – 0,199 | Sangat Rendah |

Sumber : Tarigan, 2019

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4 Hasil Penelitian Terdahulu

| No. | Peneliti, Judul, dan Metode Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|-----|--|--|---|---|
| 1 | <p>Peneliti: Dwiwicaksoputro, W., & Gunadi, G. I. (2022)</p> <p>Judul: Konsep Sistem Pengadaan Munisi Kaliber Kecil Mendukung Logistik Wilayah Pertahanan Ibukota Negara Nusantara.</p> <p>Metode: Kuantitatif.</p> | <p>Penelitian ini menghasilkan pemahaman mendalam tentang persiapan logistik, khususnya pengadaan amunisi kaliber kecil, dalam mendukung kekuatan TNI untuk melaksanakan tugas pertahanan di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). Fokus penelitian adalah menganalisis desain sistem yang tepat untuk pengadaan amunisi kaliber kecil serta memahami proses pengadaan tersebut dalam</p> | <p>Penelitian ini mengkaji pengadaan amunisi untuk mendukung kekuatan TNI di IKN.</p> | <p>Penelitian berfokus pada Analisa SWOT bukan pemenuhan alutsista untuk IKN dalam bentuk regresi linier.</p> |

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| | | konteks memperkuat logistik di IKN. | | |
| 2 | <p>Peneliti: Kalasmoro, K., Sutisna, S., Arief, S., & Haryanto, A. (2023)</p> <p>Judul: Simulation of Military Operation to National Capital City (IKN) Nusantara if Sipadan Island is a Military Base.</p> <p>Metode: Penelitian ini menggunakan metode simulasi.</p> | <p>Hasil simulasi menunjukkan waktu tempuh pesawat tempur sekitar 15-38 menit, dengan jarak antara Pulau Sipadan dan IKN Nusantara sekitar 602 km dan kecepatan pesawat yang diestimasi berkisar antara 950 km/jam hingga maksimum 2.500 km/jam. Apabila operasi pendaratan pantai dilakukan, informasi menunjukkan bahwa jarak terpendek antara Pulau Sipadan dan Pulau Sebatik adalah sekitar 78.9409 km. Untuk operasi kapal selam, jalur ALKI II dianggap sebagai jalur paling</p> | <p>Membahas mengenai wilayah IKN dalam aspek pertahanan.</p> | <p>Penelitian fokus pada simulasi pertahanan bukan kebutuhan alutsista IKN.</p> |

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| | | sesuai berdasarkan data peta batimetri Indonesia | | |
| 3 | <p>Peneliti: Rahman, A. R., Noor, F., & Kosandi, M. (2023).</p> <p>Judul: New Capital City's Geopolitical Landscape.</p> <p>Metode: Kualitatif menggunakan pendekatan studi dengan fokus pada interaksi antara negara, bisnis, dan masyarakat terkait ibu kota baru Indonesia dari segi geopolitik.</p> | <p>Penelitian ini mengungkapkan bahwa relokasi dan pembangunan ibu kota baru Indonesia, Nusantara, membawa tantangan serius, terutama dalam dimensi geopolitik domestik dan internasional. Ibu kota baru Indonesia terletak dalam lanskap geopolitik yang kompleks, dengan konflik potensial di batas maritim dan ancaman sosial dari kelompok teroris.</p> | <p>Penelitian membahas relokasi IKN dalam aspek geografis serta ketahanannya.</p> | <p>Penelitian tidak membahas tentang pengadaan alutsista matra darat.</p> |

| | | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|--|
| 4 | <p>Peneliti: Ningsih, S., & Dukalang, H. H. (2019)</p> <p>Judul: Penerapan Metode Suksesif Interval pada Analisis Regresi Linier Berganda</p> <p>Metode: Metode eksperimental dengan menambahkan gugus yang bersifat energetik seperti gugus nitro pada propelan.</p> | <p>Hasil penelitian ini melibatkan data yang berskala ordinal. Untuk mengolah data ini, penelitian melakukan transformasi data menjadi skala interval dengan menggunakan metode suksesif interval. Hasil transformasi ini memungkinkan pembentukan model regresi yang memanfaatkan data dalam skala interval. Dalam proses ini, asumsi model regresi linier berganda terpenuhi dengan baik, dan model tersebut memiliki koefisien determinasi yang lebih tinggi. Di sisi lain, jika menggunakan data yang tetap dalam skala ordinal, asumsi regresi linier tidak dapat terpenuhi dengan memadai.</p> | <p>Membahas model regresi linier.</p> | <p>Penelitian tidak berfokus pada permodela pemenuhan kebutuhan alutsista untuk IKN.</p> |
|---|--|--|---------------------------------------|--|

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| 5 | <p>Peneliti: Hasan, S., & Haeran, H. (2023)</p> <p>Judul: Strategi Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Ditinjau dari Perspektif Pertahanan Maritim</p> <p>Metode: Kualitatif deskriptif dengan metode atau pendekatan studi kasus (case study).</p> | <p>Temuan dari penelitian menunjukkan adanya hambatan dalam proses pemindahan ibu kota negara, terutama dalam konteks pertahanan maritim. Hal ini mencakup permasalahan seperti sistem pertahanan maritim yang kurang optimal dan kurangnya koordinasi antara berbagai institusi pemerintah dan pihak terkait. Adapun strategi yang disarankan melibatkan perubahan dalam Gelar Kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memastikan keamanan di Ibu Kota Negara.</p> | <p>Membahas tentang IKN dan strategi pertahanannya.</p> | <p>Penelitian tidak menggunakan regresi linier.</p> |
| 6 | <p>Peneliti:</p> | <p>Hasil dari penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan penting. Pertama,</p> | <p>Menggunakan uji regresi linier.</p> | <p>Penelitian berfokus pada pengaruh anggaran dan MEF terhadap postur</p> |

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| | <p>Rifai, M., Tutu, A., Mulyani, M., Sunra, A., & Prihantoro, K. (2022)</p> <p>Judul: Pengaruh Anggaran Pertahanan Dan Minimum Essential Force Terhadap Postur Tentara Nasional Indonesia (Studi Di Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan).</p> <p>Metode: Kuantitatif menggunakan Survei dengan pengumpulan data melalui kuesioner.</p> | <p>anggaran pertahanan dan minimum essential force memiliki pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap postur Tentara Nasional Indonesia. Kedua, anggaran pertahanan menunjukkan pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap postur Tentara Nasional Indonesia secara individual. Terakhir, minimum essential force memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap postur TNI.</p> | | <p>TNI bukan kepada pemenuhan kebutuhan alutsista untuk IKN.</p> |
| 7 | <p>Peneliti: Kapiarsa, A. B. (2020)</p> <p>Judul:</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik geografi pertahanan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser</p> | <p>Membahas tentang pertahanan ibu kota baru indonesia.</p> | <p>Penelitian tidak menggunakan regresi linier.</p> |

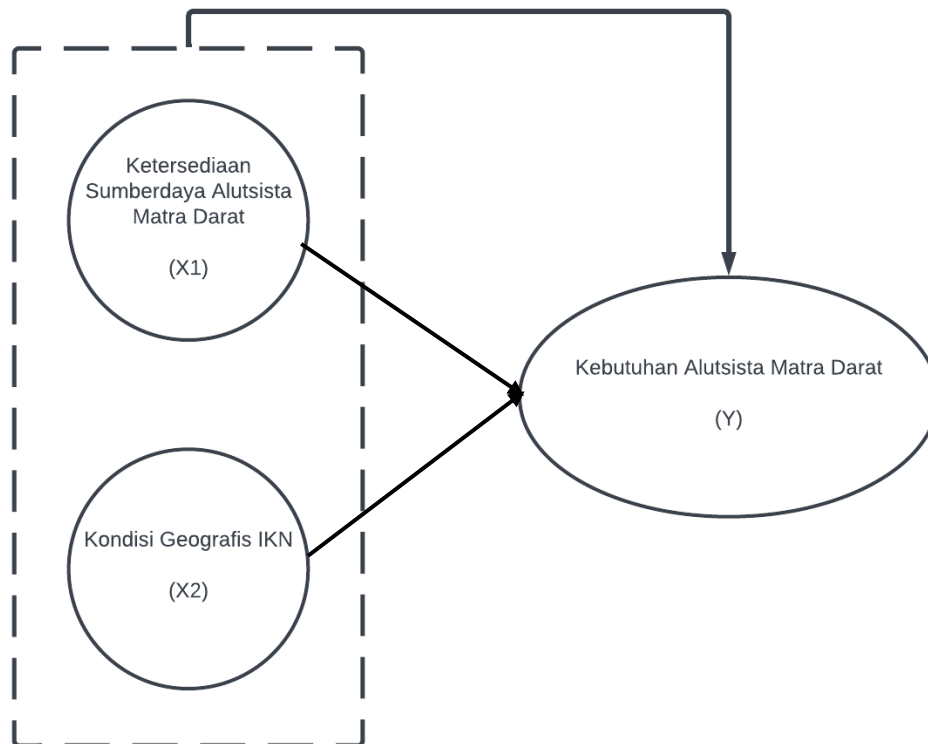
| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| | <p>Penanganan Potensi Ancaman Terorisme di Ibu Kota Baru Indonesia Studi Kasus: Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara</p> <p>Metode: Kualitatif dengan pengumpulan data dari media, buku, dan jurnal.</p> | <p>Utara perlu diperbarui untuk menghadapi potensi ancaman terorisme di sekitar kawasan IKN baru. Ini membutuhkan kerjasama pertahanan dan keamanan yang kuat antar wilayah dan negara tetangga, reformasi pendidikan agama dan kewarganegaraan, serta pengembangan keterampilan warga lokal yang berpendidikan rendah dan berisiko menganggur dengan perubahan menuju IKN baru.</p> | | |
| 8 | <p>Peneliti: Dwiwicaksoputro, W., & Gunadi, G. I. (2022)</p> <p>Judul:</p> | <p>Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dinyatakan bahwa dengan pendekatan sistem dan analisis SWOT, evaluasi skema pengadaan munisi kaliber kecil yang sudah</p> | <p>Membahas tentang pertahanan ibu kota Nsuantara.</p> | <p>Penelitian tidak menggunakan regresi linier.</p> |

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| | <p>Konsep Sistem Pengadaan Munisi Kaliber Kecil Mendukung Logistik Wilayah Pertahanan Ibukota Negara Nusantara</p> <p>Metode: Kualitatif menggunakan studi kepustakaan.</p> | <p>ada didapati sistem selama ini sudah bagus, namun juga masih ada ruang untuk perbaikan.</p> | | |
| 9 | <p>Peneliti: Supriyatno, M. (2018)</p> <p>Judul: Pertimbangan Pemindahan Ibukota Negara Ditinjau Dari Perspektif Geografi Pertahanan.</p> <p>Metode: Kualitatif.</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan jika pemindahan ibukota tetap dianggap perlu, Jonggol dan Kota Palangkaraya adalah opsi alternatif yang layak dipertimbangkan dari perspektif geografi pertahanan dan diperlukan penelitian lebih lanjut yang melibatkan para ahli geografi, pengembangan wilayah, tata kota, dan bidang terkait</p> | <p>Membahas tentang kondisi geografis ibu kota Nusantara.</p> | <p>Penelitian tidak menggunakan regresi linier.</p> |

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| | | lainnya. Teknologi SIG/GIS dapat digunakan untuk menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan akurat dalam konteks pemindahan ibukota negara. | | |
| 10 | <p>Peneliti: Putri, Y. L. Y. H. (2021).</p> <p>Judul: Studi Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Militer Di Indonesia Tahun 1981-2018.</p> <p>Metode: <i>Mix Method / Kuantitatif</i></p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran militer di Indonesia saling memengaruhi. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, pengeluaran militer cenderung naik, dan sebaliknya. Uji kointegrasi juga menegaskan hubungan jangka panjang antara keduanya.</p> | <p>Penelitian dilakukan dengan analisis regresi.</p> | <p>Penelitian berfokus pada aspek pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran militer bukan pemenuhan kebutuhan alutsista untuk IKN.</p> |

Sumber : Diolah Peneliti, 2023.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

Sumber : Diolah Peneliti (2023)

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara atas pertanyaan pada penelitian ini.

- H1 : Ketersediaan Sumberdaya Alutsista Matra Darat Berpengaruh Signifikan Terhadap Kebutuhan Alutsista Matra Darat IKN
- H2 : Kondisi Geografis Berpengaruh Signifikan Terhadap Kebutuhan Alutsista Matra Darat IKN
- H3 : Ketersediaan Sumberdaya Alutsista Matra Dan Kondisi Geografis Berpengaruh Signifikan Terhadap Kebutuhan Alutsista Matra Darat IKN